

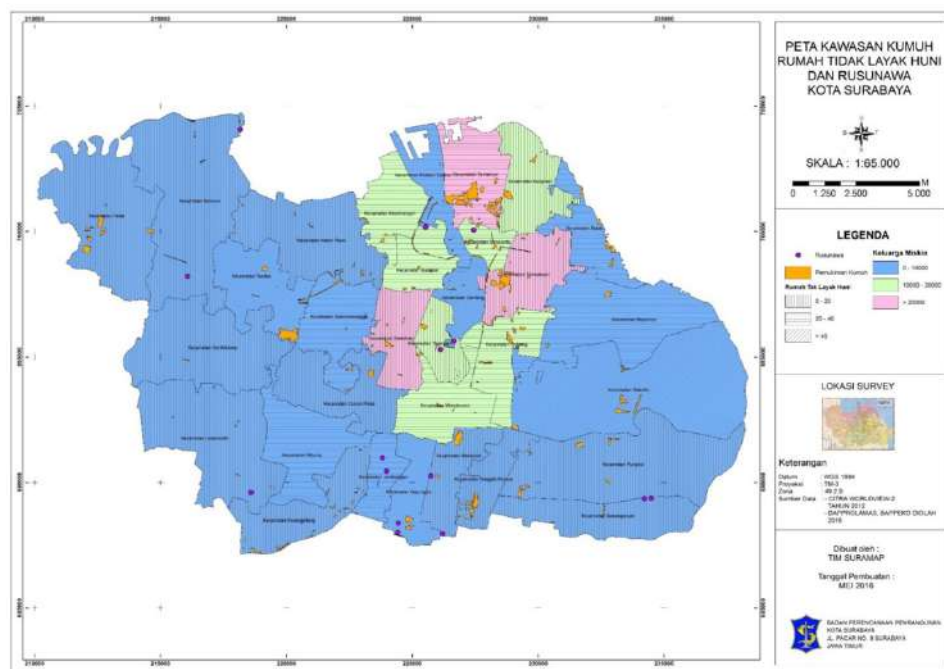
BAB II

GAMBARAN UMUM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA SURABAYA

2.1. Kondisi Umum Kemiskinan di Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Sebagai kota metropolitan, kota Surabaya berada pada urutan terbesar kedua di Indonesia (GNFI,2023). Kota Surabaya dikategorikan sebagai kota metropolitan karena mempunyai jumlah penduduk yang besar. Menurut data BPS 2023, penduduk Kota Surabaya 2023 sebesar 2,887 juta jiwa.

Gambar 2. 1 Peta Sebaran Keluarga Miskin di Kota Surabaya tahun 2016



Sumber: Website Pemerintah Kota Surabaya.
https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2016/11/16408/bab_2.pdf, 2024.

Jumlah penduduk Kota Surabaya yang besar linear dengan jumlah penduduk miskinnya yang cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota

Surabaya, jumlah penduduk miskin Kota ini Sebesar 219.427 jiwa atau setara 7,6% keseluruhan penduduknya pada tahun 2022. Jumlah tersebut tersebar dalam 31 kecamatan di Kota Surabaya seperti tabel dibawah ini.

Tabel Tabel 2. 1. Data Penduduk Miskin Kota Surabaya
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022 dan 2023

KECAMATAN	TAHUN 2022 (JIWA)	TAHUN 2023 (JIWA)	PROGRES
TAMBAKSARI	31.036	19.654	TURUN
WONOKROMO	17.115	11.973	TURUN
SUKOMANUNGGAL	15.242	3.410	TURUN
SEMAMPIR	14.782	15.171	NAIK
GUBENG	12.547	9.613	TURUN
SIMOKERTO	10.846	9.686	TURUN
SAWAHAN	10.258	13.321	NAIK
TEGALSARI	10.051	10.882	NAIK
KREMBANGAN	9.481	11.512	NAIK
KENJERAN	7.776	5.745	TURUN
GENTENG	7.240	4.429	TURUN
WONOCOLO	6.990	5.509	TURUN
SUKOLILO	6.810	4.365	TURUN
DUKUH PAKIS	6.550	3.154	TURUN
PABEAN CANTIAN	6.094	10.487	NAIK
BUBUTAN	5.658	4.253	TURUN
KARANG PILANG	5.650	6.074	NAIK
SAMBIKEREP	5.487	4.628	TURUN
ASEM ROWO	4.456	3.607	TURUN
MULYOREJO	4.140	2.468	TURUN
BULAK	3.324	1.486	TURUN
WIYUNG	3.009	1.328	TURUN
RUNGKUT	2.685	1.462	TURUN
TENGGILIS MEJOYO	2.504	1.526	TURUN
TANDES	2.219	1.733	TURUN
JAMBANGAN	2.079	1.853	TURUN
PAKAL	1.601	1.542	TURUN
GUNUNG ANYAR	1.255	968	TURUN
GAYUNGAN	1.092	689	TURUN
LAKARSANTRI	765	1.041	NAIK
BENOWO	685	816	NAIK
JUMLAH	219.427	174.385	

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Surabaya 2023

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, Pada tahun 2022 dan 2023 Kecamatan Tambaksari menempati jumlah penduduk miskin terbesar pertama. Penduduk miskin terendah pada tahun 2022 ditempati oleh Kecamatan Benowo dengan jumlah 685 jiwa dan pada tahun 2023 ditempati oleh Kecamatan Gayungan dengan jumlah penduduk miskin sebesar 689 jiwa.

2.1.1. Kondisi Umum kecamatan di Kota Surabaya

Kecamatan yang akan digunakan sebagai lokasi penelitian terdiri dari 5 kecamatan yang masing-masing mewakili wilayah/zonanya. Lima kecamatan tersebut yakni Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Sukomanunggal, dan Kecamatan Tegalsari.

Gambar 2. 2. Peta Kecamatan di Kota Surabaya yang digunakan sebagai lokasi Penelitian



Sumber: Data Wikipedia diedit, 2024

Gambar 2.2 memperlihatkan bahwa Kecamatan Pabean Cantikan merupakan kecamatan yang mewakili Surabaya Utara sebagai sampel, Kecamatan Tambaksari mewakili Surabaya Timur, Kecamatan Wonokromo yang mewakili Surabaya Selatan, Kecamatan Sukomanunggal yang mewakili Surabaya Barat, dan Kecamatan Tegalsari yang mewakili Surabaya Pusat

Tabel 2. 2 Data Penduduk Miskin yang Ditempel Stiker Keluarga Miskin Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022 dan 2023

Surabaya Utara				Surabaya Selatan			
KECAMATAN	2022	2023	PROGRES	KECAMATAN	2022	2023	PROGRES
SEMAMPIR	14782	15171	NAIK	DUKUH PAKIS	6550	3154	TURUN
KREMBANGAN	9481	11512	NAIK	KARANG PILANG	5650	6074	NAIK
KENJERAN	7776	5745	TURUN	WIYUNG	3009	1328	TURUN
PABEAN CANTIAN	6094	10487	NAIK	JAMBANGAN	2079	1853	TURUN
BULAK	3324	1486	TURUN	GAYUNGAN	1092	689	TURUN
Surabaya Timur				Surabaya Pusat			
TAMBAKSARI	31036	19654	TURUN	SIMOKERTO	10846	9686	TURUN
GUBENG	12547	9613	TURUN	TEGALSARI	10051	10882	NAIK
SUKOLILO	6810	4365	TURUN	GENTENG	7240	4429	TURUN
MULYOOREJO	4140	2468	TURUN	BUBUTAN	5658	4253	TURUN
RUNGKUT	2685	1462	TURUN	Surabaya Barat			
TENGILIS MEJOYO	2504	1526	TURUN	SUKOMANUNGGAL	15242	3410	TURUN
GUNUNG ANYAR	1255	968	TURUN	SAMBIKEREP	5487	4628	TURUN
Surabaya Selatan				ASEM ROWO	4456	3607	TURUN
WONOKROMO	17115	11973	TURUN	TANDES	2219	1733	TURUN
SAWAHAN	10258	13321	NAIK	PAKAL	1601	1542	TURUN
WONOCOLO	6990	5509	TURUN	LAKARSANTRI	765	1041	NAIK
				BENOWO	685	816	NAIK

 wilayah penelitian

Sumber: Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,
Dinas Sosial Kota Surabaya 2023

2.1.1.1. Kecamatan Tambaksari

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dilihat bahwa kecamatan Tambaksari adalah kecamatan dengan penduduk miskin terbanyak dari keempat lokasi penelitian lainnya sebesar 19.654 jiwa. Jumlah penduduk yang besar tersebut dikarenakan Kecamatan Tambaksari merupakan wilayah padat penduduk.

2.1.1.2. Kecamatan Sukomanunggal

Kecamatan Sukomanunggal sebagai wilayah penelitian dengan jumlah penduduk miskin terendah dari lima kecamatan dikarenakan Kecamatan Sukomanunggal merupakan kawasan yang didominasi dengan perhotelan, mall, dan rumah-rumah mewah dan wilayah perdagangan.

2.1.1.3. Kecamatan Tegalsari

Kecamatan Tegalsari sebagai lokasi penelitian dengan jumlah penduduk miskin terbesar kedua dari kelima lokasi penelitian. Terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 800 orang. Kecamatan ini adalah kecamatan yang berada di pusat kota dengan basis basis masa partai penguasa yang banyak terlihat dari stiker yang ditempel di rumah-rumah warga.

2.1.1.4. Kecamatan Wonokromo

Kecamatan Wonokromo merupakan kecamatan yang berada di bagian selatan Kota Surabaya. Kecamatan ini memiliki penduduk miskin paling besar di wilayah selatan. Dengan banyaknya penduduk miskin di wilayah ini tidak diragukan apabila Kecamatan Wonokromo adalah wilayah kekuasaan partai penguasa Kota Surabaya.

2.1.1.5. Kecamatan Pabean Cantian

Kecamatan Pabean Cantian merupakan kecamatan yang berada di utara Kota Surabaya. Kecamatan ini bersebrangan langsung dengan selat madura sehingga banyak penduduk kecamatan Pabean Cantian bersuku madura. Kecamatan

ini memiliki karakter masyarakatnya yang cukup keras daripada keempat kecamatan lainnya.

2.2. Tinjauan Umum Organisasi Perangkat Daerah Pengampu Pengentasan Kemiskinan

Dinas Sosial adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan. Dinas Sosial Kota Surabaya dibentuk sejak tahun 2001 yang sebelumnya merupakan Bagian Sosial dari Pemerintah Kota Surabaya. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang sosial yang meliputi perencanaan, penyusunan program, penyuluhan, rehabilitasi sosial, dan penyelenggaraan bantuan sosial. Bidang di Dinas Sosial yang secara khusus bertanggung jawab mengatur pelaksanaan pengentasan kemiskinan di kota Surabaya adalah Perlindungan dan Jaminan. Tugas bidang ini adalah untuk menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta mempunyai fungsi:

- a. Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Pemberian dan Pengawasan Pemberian Bantuan Sosial kepada Keluarga Miskin dan PMKS.
- c. Sinkronisasi data Keluarga Miskin dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- d. Penetapan Sasaran Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

- e. Pendataan, Pemutakhiran dan Distribusi Data Keluarga Miskin dan PMKS.

2.3. Pengolahan Data Keluarga Miskin di Kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya adalah salah satu pemerintahan yang memiliki data penduduk miskin sendiri. Alasan menggunakan data penduduk miskin sendiri menurut Imam Mahmudi kepala bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) yakni,

“Data keluarga miskin dari Badan Pusat Statistik adalah data agregat dari keluarga miskin. Sehingga keakuratan data seringkali dipertanyakan. Bahkan seringkali data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya jumlahnya lebih besar dari data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS).” (Wawancara, 27 maret 2024)

Oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penentu keluarga miskin namun menggunakan indikator yang lebih teknis. Indikator keluarga miskin tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 pasal 5 ayat (2), yakni:

1. anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. jumlah tanggungan dalam satu keluarga;
3. terdapat tanggungan anggota keluarga yang sedang sekolah/sakit/lansia;
4. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;

5. kondisi lantai terbuat dari tanah atau plesteran/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
6. atap terbuat dari genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
7. luas lantai tempat tinggal; dan/atau
8. kepemilikan aset;

Dari delapan indikator tersebut, masyarakat dinyatakan memenuhi syarat dapat diajukan dalam pendataan keluarga miskin melalui RT masing-masing dengan sistematika pendataan keluarga miskin sebagai berikut.

Gambar 2. 3 Sistematika Pendataan Keluarga Miskin Kota Surabaya



Sumber: Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Surabaya
2024

Dasar hukum alur penetapan data keluarga miskin di kota Surabaya tertuang dalam peraturan Walikota Surabaya nomor 106 tahun 2022 junto Peraturan Walikota Surabaya nomor 117 tahun 2022 Pasal 5 ayat (1) seperti ringkasan yang

terdapat pada gambar 2.4 diatas. Sistematika pendataan keluarga miskin di Kota Surabaya antara lain:

1. Usulan keluarga miskin baru disampaikan ke RT. Jika RT menyatakan masuk kriteria keluarga miskin maka selanjutnya dimasukan melalui aplikasi sikeluargamiskin.com
2. Usulan ditindaklanjuti oleh RW dan diverifikasi oleh RW
3. Usulan ditindaklanjuti kelurahan dengan melakukan verifikasi berdasarkan indikator infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Jika dirasa memenuhi maka akan diteruskan ke kecamatan.
4. Kecamatan melakukan verifikasi seperti yang dilakukan oleh kelurahan dan apabila dirasa memenuhi akan diteruskan ke dinas sosial
5. Dinas sosial melakukan verifikasi:
 - a. apabila masuk dalam kriteria keluarga miskin maka dilakukan musyawarah kelurahan untuk usulan baru keluarga miskin yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali.
 - b. Sedangkan masyarakat yang tidak layak masuk data keluarga miskin maka dilakukan musyawarah kelurahan untuk penidak layakan dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan. Hasil dari musyawarah kelurahan adalah Berita Acara Muskel yang jadi dasar untuk melakukan graduasi.
6. Setelah berhasil diajukan, pihak kelurahan akan menempelkan stiker keluarga miskin berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Surabaya.